

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

Oleh: **Muhammad Riki Novriansyah**

Pembimbing: Ben Hansel Notatema Zebua, S.I.P., M.A

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/ Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Lima Puluh District is an area in Pekanbaru City, Riau Province. This district was chosen as the research object due to the discovery of 60 cases of stunting in Lima Puluh District, the highest number compared to 14 other districts, and the lack of nutrition service personnel, with only one nutrition service officer in Lima Puluh District. The study analyzed the implementation of the program to accelerate stunting prevention and reduction and its inhibiting factors using Edwards III's theory, which covers four aspects: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study employed a qualitative-descriptive approach, with primary data consisting of interviews, documentation, and observations, and secondary data in the form of evidence, notes, or reports.

The results of the study indicate that the implementation of the Stunting Prevention and Reduction Acceleration Program in Lima Puluh Kota District, Pekanbaru, in 2022 has been carried out, but is not yet perfect. First, the communication aspect tends to be ineffective due to the lack of community interest in participating in education and outreach provided by integrated health posts (Posyandu) and community health centers (Puskesmas). Second, the Resource Aspect still needs to be improved by considering incentives that can improve the quality of Posyandu cadres. Third, the Disposition Aspect, implementers have demonstrated a positive disposition through actions that are always ready, active, and responsible in carrying out each stunting prevention program. Fourth, the Bureaucratic Structure, implementers have understood and carried out their duties and authorities.

Keywords: *Implementation – Program – Stunting - acceleration - prevention*

PENDAHULUAN

Stunting bisa saja terjadi dimulai saat janin sedang berada di kandungan dan akan terlihat saat anak telah berumur dua tahun (Sandojo, 2017). Dalam penilaian status gizi anak berdasarkan standar antropometri, stunting merupakan kondisi yang ditentukan dari indeks panjang atau tinggi badan menurut umur, hasil pengukuran tersebut ada pada ambang batas di bawah nilai 2 SD sampai dengan nilai minus 3 SD (pendek/stunted) dan di bawah nilai minus 3 SD (sangat pendek/severely stunted) (Trihono, dkk,

2015). Peningkatan kasus stunting umumnya mulai terlihat pada usia 3 bulan, kemudian lajunya melambat saat anak memasuki usia sekitar 3 tahun. Terdapat perbedaan cara memaknai stunting pada dua kelompok usia anak. Pada anak usia di bawah 2 hingga 3 tahun, stunting masih merupakan proses yang sedang berlangsung, menunjukkan kegagalan tumbuh yang belum sepenuhnya terjadi. Sedangkan pada anak yang berusia lebih dari 3 tahun, kondisi tersebut mencerminkan hasil akhir dari kegagalan pertumbuhan, di mana

anak telah mengalami stunting (Sandra Fikawati dkk, 2017).

Dampak yang diciptakan pada anak yang menderita stunting adalah seperti adanya kerusakan pada organorgan tubuh yang mana organ yang paling cepat mengalami kerusakan ialah otak (Picauly, 2013:8). Otak merupakan pusat syaraf yang sangat berpengaruh terhadap respon anak untuk melihat, mendengar, berpikir, dan melakukan gerakan. Sesuai dengan pandangan Almatsier, kekurangan gizi dapat mengakibatkan kerusakan fungsi otak yang tidak dapat dipulihkan atau bersifat menetap (Mitra, 2015:2).

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Makalah Utama Bidang 5 idyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, stunting yang dialami anak sejak usia dini dapat menyebabkan gangguan kognitif permanen. Gangguan tersebut berdampak pada kurang optimalnya perkembangan motorik dan kecerdasan, yang selanjutnya berkontribusi terhadap rendahnya capaian pendidikan, penghasilan, dan produktivitas di usia dewasa, serta berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Wamani et al., sebagaimana dikutip dalam Sandra Fikawati dkk (2017), menyebutkan bahwa stunting merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk berat badan lahir yang rendah, minimnya stimulasi dan pengasuhan yang sesuai, kekurangan asupan gizi, infeksi berulang, serta kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Terdapat sejumlah faktor penyebab stunting pada balita, yang dibagi menjadi dua kelompok utama: faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri atas kurangnya nutrisi yang diterima ibu selama kehamilan, kelahiran prematur, kesalahan dalam pemberian makanan kepada anak, serta ketidakcukupannya pemberian ASI eksklusif. Sementara itu, faktor tidak langsung melibatkan aspek seperti akses pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan orang tua, norma sosial budaya, dan kondisi sanitasi

lingkungan. (Nasution IS, 2022)

Anak-anak yang mengalami stunting tidak mendapatkan haknya secara penuh, yaitu hak untuk hidup sejahtera dan sehat secara fisik maupun mental sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan” Ketika anak mengalami kekurangan gizi kronis sejak usia dini, artinya mereka tidak mendapatkan lingkungan hidup yang mendukung tumbuh kembang yang optimal, termasuk dalam aspek gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan.

Menurut data yang dirilis oleh United Nations Children's Fund pada tahun 2019 terdapat 2 dari 5 balita di seluruh dunia mengalami stunting. Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang tinggi. Tahun 2021 Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki prevalensi stunting tertinggi kedua, yakni 24,4%, setelah Timor Leste yang berada di posisi teratas dengan angka 48,8%. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6% menurun dari tahun sebelumnya yang artinya terjadi penurunan prevalensi

3,8% dari tahun 2021

Jumlah anak yang mengalami stunting di Kota Pekanbaru saat ini mencapai 22%, meningkat dari angka 11,4% pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya pencegahan semaksimal mungkin untuk menurunkan angka stunting.

Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Deklarasi Gerakan Pencegahan Stunting dan melaksanakan Program-program yang termasuk dalam usaha untuk menurunkan angka stunting antara lain program Pemberian Makanan Tambahan, imunisasi, Kelas Balita dan Ibu Hamil, dan sebagainya untuk mendukung upaya penurunan angka stunting. Untuk merealisasikan prediksi tersebut,

Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134

Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting dengan pertimbangan bahwa kasus stunting di Kota Pekanbaru dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Kecamatan Limapuluh, yang merupakan bagian dari Kota

Pekanbaru di Provinsi Riau, tercatat memiliki 38.613 penduduk pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk mencapai 6.995 jiwa setiap kilometer persegi, menurut data Badan Pusat Statistik setempat.

Jumlah kasus stunting anak di Kecamatan Limapuluh saat ini mencapai angka tertinggi di Kota Pekanbaru, yaitu sebanyak 60 kasus. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah tersebut yang sebagian berada di kawasan bantaran sungai. Kondisi ini menyebabkan akses sanitasi dan praktik kesehatan lingkungan menjadi tidak memadai di tingkat rumah tangga, sehingga meningkatkan resiko paparan penyakit tularan terutama pada Bayi. Akses sanitasi merupakan hal penting yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021, pada pasal 10 menyebutkan bahwa “Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih; menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi.

Faktor ekonomi secara tidak langsung berkontribusi terhadap kejadian stunting di suatu daerah. Sekitar 70% dari peningkatan angka stunting dipengaruhi oleh berbagai aspek non-kesehatan, seperti terbatasnya air bersih, kurangnya pengetahuan ibu hamil, pola asuh yang kurang memadai, serta tekanan ekonomi keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa pandemi Covid19 yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, dengan sekitar 7,12 persen atau 272.000

penduduk tergolong miskin. Faktor-faktor utama penyebab mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, tingginya pengangguran, maraknya pernikahan usia dini, serta ketimpangan sosial.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru mengalami kenaikan hampir 1 persen, tepatnya meningkat 0,89 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,23 persen menjadi 7,12 persen (BPS, 2023). Faktor ekonomi dan sosial dalam lingkungan keluarga turut berkontribusi terhadap risiko stunting pada anak, Dalam studi yang dilakukan oleh Oktavia (2021), ditemukan bahwa status sosial ekonomi keluarga berkaitan dengan terjadinya stunting. Pendapatan keluarga dan pendidikan orangtua dapat merupakan faktor sosial ekonomi keluarga yang dapat menyebabkan terjadinya stunting

Masa 1000 hari pertama kehidupan bayi adalah waktu yang sangat penting, namun pada kenyataannya, banyak balita dalam rentang usia 0-59 bulan masih menghadapi masalah terkait gizi (Nurwati & Ariyanto, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya pemantauan pada 1000 hari pertama kehidupan, yang dikenal sebagai masa emas pertumbuhan dan perkembangan bayi. Namun, pada periode ini, banyak balita menghadapi masalah gizi. Oleh karena itu, perhatian khusus serta kolaborasi bersama sangat diperlukan untuk meningkatkan status gizi anak selama masa krusial tersebut, sebab itu pemerintah kota pekanbaru menetapkan Kebijakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 mengatur tentang Kegiatan Intervensi Spesifik Kegiatan intervensi spesifik

yang ditetapkan selanjutnya dilaksanakan melalui Program-program yang direncanakan oleh pemerintah kota pekanbaru seperti Program Pemberian Makanan

Tambahan kepada ibu dan balita, Program Imunisasi, Program Bapak Asuh, dan Program Kelas balita serta ibu hamil.

Pelaksanaan program-program tersebut merupakan wujud implementasi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama dengan Puskesmas Kecamatan Limapuluh. Namun pada kenyataannya, angka stunting di Kecamatan Limapuluh tetap tinggi meskipun Pelaksana Kebijakan telah menjalankan program-program tersebut.

Dari daftar lokus stunting di Kota Pekanbaru, Kecamatan Lima Puluh tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah kasus stunting tertinggi di antara 14 kecamatan lainnya. Sehingga berdasarkan data dan permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Lima Puluh.

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas maka fenomena masalah dari penelitian ini adalah ditemukan fakta adanya 60 kasus stunting di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan angka tertinggi dibandingkan dengan 14 Kecamatan lainnya.

Karena itu, penulis memilih untuk mengkaji pelaksanaan program tersebut dalam skripsi ini. Agar sesuai dengan masalah kebijakan percepatan pencegahan stuntingnya maka penulis merumuskan judul sebagai berikut “Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Tahun 2022

RUMUSAN MASALAH

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus atau rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan, yaitu

“Bagaimana Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Tahun 2022?”

KERANGKA TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan Agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai, diperlukan tindak lanjut berupa pelaksanaan kebijakan atau program yang telah dirancang, yang dikenal dengan implementasi. Implementasi sendiri merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik, karena keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh tahap pelaksanaannya. Dalam Widodo (2021), Edward III menyatakan bahwa ada empat aspek penting dalam menjalankan implementasi kebijakan agar hasilnya optimal. Salah satunya adalah aspek komunikasi, yang terdiri dari tiga dimensi utama.

Pertama adalah transmisi informasi, yang berarti kebijakan perlu disebarluaskan tidak hanya kepada pelaksana, tetapi juga kepada kelompok target dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Dimensi kedua adalah kejelasan, yang menekankan perlunya penyampaian kebijakan yang terang dan tidak ambigu agar seluruh pihak memahami maksud, sasaran, dan isi kebijakan, serta dapat mempersiapkan langkah pelaksanaan yang tepat. Terakhir, dimensi konsistensi, yaitu menjaga agar isi kebijakan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Sebuah kebijakan hanya dapat dijalankan jika telah ada keputusan dan perintah pelaksanaan yang resmi.

Kedua Sumber daya.

Pelaksanaan kebijakan tidak terlepas dari peran penting faktor ini, sebagaimana ditegaskan oleh George C. Edwards III dalam Widodo (2021) : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturanaturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian

ketentuan-ketentuan atau aturanaturan tersebut, Apabila para pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kebijakan secara optimal, maka proses implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya yang dimaksud meliputi seluruh bentuk dukungan yang dapat menunjang keberhasilan implementasi, seperti tenaga kerja, anggaran, sarana prasarana, informasi, serta kewenangan yang dimiliki.

Ketiga, Disposisi, adalah sikap dan komitmen pelaksana terhadap program atau kebijakan yang diterapkan. Disposisi dapat dilihat dari tanggung jawab dan komitmen pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya. Disposisi yang kuat ditunjukkan dengan adanya kemauan dan penerimaan kebijakan dari pihak pelaksana kebijakan sementara itu jika disposisi terlaksana dengan buruk dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan oleh pihak pelaksana kebijakan. Disposisi harus dilaksanakan secara intensif. Menurut Mulyono Yalia (2014: 154-155) aktor disposisi berkaitan dengan respons yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan pelaksana terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Faktor ini dilihat dari tiga dimensi, yaitu: (a) efek disposisi, yang mencerminkan tingkat kepatuhan pelaksana dalam menjalankan kebijakan; (b) penempatan staf birokrasi, yaitu proses penunjukan pelaksana ke posisi yang tepat sesuai dengan tugas masing-masing; dan (c) insentif, berupa penghargaan yang diberikan kepada pelaksana di lapangan sebagai bentuk motivasi. Keempat, Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi adalah susunan organisasi yang memiliki hirarki, pembagian tugas, dan aturan yang jelas yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, efisiensi, dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas. Struktur birokrasi memiliki ciri-ciri yaitu: memiliki rantai komando yang jelas, memiliki hirarki yang terstruktur, memiliki aturan tertulis, memiliki pembagian tugas yang spesifik, memiliki kewenangan hirarki secara vertikal. Struktur birokrasi

berpengaruh dalam implementasi kebijakan dalam bentuk pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Struktur birokrasi yang berjalan dengan baik maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar dan efektif, tetapi jika struktur birokrasi tidak kondusif maka implementasi kebijakan akan terhambat dan berantakan. Edwards III dalam Winarno (2005:150) mengemukakan pengasuhan anak yang kurang nutrisi kurang dan birokrasi adalah “Standard infeksi berulang serta berbagai Operational Procedure (SOP) dan faktor lingkungan lainnya. fragmentasi.” Winarno (2005:150) menjelaskan bahwa SOP berkembang sebagai jawaban atas tuntutan internal Penelitian ini menggunakan organisasi yang luas dan pendekatan deskriptif kualitatif kompleks, yang menuntut karena dianggap mampu kepastian waktu, pengelolaan menggambarkan secara detail situasi sumber daya, serta penyeragaman dalam pelaksanaan pekerjaan. dan kejadian yang terjadi di lapangan.

METODE PENELITIAN

2. Stunting

Tujuan dari penelitian ini adalah Stunting adalah gangguan untuk memperoleh pemahaman yang pertumbuhan dan perkembangan autentik terkait pengalaman anak akibat kekurangan gizi pengalaman individu sebagaimana kronis dan infeksi berulang yang mereka alami secara langsung ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah (Mulyana, 2008:156).

Standar yang ditetapkan. Bayi Teknik pengumpulan data yang yang mengalami kekurangan gizi digunakan yaitu (a) Metode dalam seribu hari pertama pengamatan, adalah teknik kehidupannya akan mengalami pengumpulan data yang dilakukan gangguan pada perkembangan dengan mengamati secara langsung otak dan tumbuh kembangnya objek

atau aktivitas yang menjadi sehingga anak dengan kondisi stunting memiliki tinggi badan fokus penelitian.(b)Wawancara yang lebih rendah dari rata-rata mendalam (indepth interview) balita seusianya. dilakukan dengan tujuan untuk Menurut Sandojo (2017), membangun pemahaman tentang stunting bisa dimulai sejak bayi seseorang, peristiwa, aktivitas, masih di dalam kandungan dan organisasi, perasaan, motivasi, baru dapat terlihat saat usia anak tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lain mencapai dua tahun. Stunting adalah kondisi status gizi yang yang terkait; membangun pemahaman diukur melalui indeks panjang tersebut berdasarkan pengalaman atau tinggi badan sesuai usia, di masa lalu; menggambarkan harapan mana standar Pekanbaru, Sekretaris Camat, dan Ahli Gizi di Puskesmas Kecamatan Lima. Dokumentasi, Dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, peneliti melakukan (c)teknik dokumentasi dengan cara merekam atau menyalin dokumendokumen dan arsip yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Tahun 2022

a) Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh

Ko ta Pekanbaru Melalui 8 Aksi Konvergensi.

i) Analisa Situasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Riska Yunita, dikatakan bahwa penerapan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting dimulai dengan menganalisis data yang dilakukan setiap awal tahun. Pada tahap analisis data ini dilakukan tidak hanya terkait masalah gizi saja, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab dari terjadinya stunting seperti faktor lingkungan, pola asuh, kurangnya

antropometri atau proyeksi pengalaman yang menempatkan hasil pengukuran diinginkan di masa depan; serta untuk tersebut pada batas antara -2 SD memverifikasi, mengoreksi, dan sampai -3 SD sebagai pendek (stunted) dan di bawah -3 SD memperkaya informasi yang sebagai sangat pendek (severely diperoleh dari sumber lain stunted) (Trihono, dkk, 2015) (triangulasi), sebagaimana Menurut Wamani dalam dikemukakan oleh Guba dan Lincoln Sandra Fikawati dkk (2017) (Moleong, 2007:186).

Adapun Stunting merupakan dampak dari Informan dalam penelitian ini terdiri berbagai faktor seperti Berat lahir dari Dinas Kesehatan Kota yang rendah, stimulasi dan

pengetahuan, serta ekonomi. Analisis Data atau Situasi ini merupakan tahapan yang bermakna untuk mengetahui penyebab stunting dan menyusun rencana pencegahan dan penanganan yang tepat

Analisis data diperlukan dalam implementasi kebijakan sebab analisis data berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi kebijakan, mengidentifikasi peluang pertumbuhan untuk masa depan, meminimalisir resiko yang tidak diinginkan, membantu membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi, dan memberikan masukan-masukan yang memperhitungkan keutamaan dan kepekaan kepada para implementor. Data yang telah dianalisis dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang kemudian dijadikan dasar dalam implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai target yang kemudian mensukseskan kebijakan yang diimplementasikan dengan efisiensi yang tinggi tanpa terbentur masalah yang tidak diinginkan yang justru memperlambat proses implementasian kebijakan dan merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

ii) Rencana Kegiatan

Sebelum intervensi dijalankan, Puskesmas menyusun kerangka kegiatan yang fokus pada penanganan langsung penyebab stunting, seperti kecukupan nutrisi, infeksi, kondisi gizi ibu, penyakit menular, serta sanitasi lingkungan (Kusumawardani et al., 2020). Dari hasil wawancara bersama Ibu Isra Maretfa, beliau menjelaskan bahwa Untuk mencegah kenaikan angka stunting, Puskesmas Kecamatan Lima Puluh menyiapkan dan melaksanakan program PMT atau Pemberian Makanan Tambahan yang dilakukan secara rutin seperti perdua minggu memberikan susu dan perbulan memberikan makanan biskuit untuk Ibu Hamil. Selain itu juga ada program imunisasi serta pemberian obat cacing, obat diare, dan suplemen zink kepada Balita.

iii) Rembuk Stunting Rembuk Stunting diselenggarakan setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan Analisis Situasi dan menyusun rencana kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi. menurut hasil wawancara bersama bapak Ramlan Darmansyah, diketahui bahwa Kantor Camat Kecamatan Lima Puluh mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Limapuluh dengan memfasilitasi berbagai kegiatan rutin seperti pelaksanaan suatu program ataupun Mini Loka Karya yang dilakukan dengan koordinasi bersama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Puskesmas, posyandu, dan Dinas Kesehatan. Mini Loka Karya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dari lintas sektor, kemudian pemantauan serta evaluasi kegiatan pencegahan stunting ini.

iv) Peraturan walikota terkait peran kelurahan dalam konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan Stunting

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ini adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang

Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.

v) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Isra Maretfa dapat diketahui bahwa masih diperlukan perhatian terhadap kader posyandu. Ibu Isra menekankan pentingnya insentif untuk para kader posyandu. Insentif yang diberikan dapat berupa uang, piagam penghargaan, bantuan operasional, pembekalan, dan sebagainya yang dapat meningkatkan motivasi para kader posyandu. Dengan memperhatikan pemberian insentif para kader akan meningkatkan kapasitas kinerja mereka dalam melaksanakan tugasnya

vi) Manajemen Data

Aksi ini mencakup kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data terkait kasus stunting serta cakupan intervensinya di tingkat Kabupaten/Kota. Puskesmas Kecamatan

Limapuluh berwenang dalam pencatatan data kasus anak stunting di Kecamatan Limapuluh. Kegiatan pencatatan laporan yang diterima dari masyarakat dan laporan tentang program yang telah dilaksanakan dicatatkan kedalam laporan biru yang kemudian dicetak setiap bulannya. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang berwenang atas manajemen data yang disimpan.

vii) Pengukuran dan Publikasi

Puskesmas Limapuluh melakukan pencatatan saat ibu membawa balita datang mengunjungi Puskesmas Limapuluh untuk diberikan vaksin imunisasi, selagi kunjungan pihak Puskesmas juga melakukan pengukuran tinggi dan berat badan balita menggunakan standar antropometri anak untuk menganalisa apakah anak mengalami stunting atau tidak. Publikasi merupakan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terhadap konvergensi stunting yang tercantum dalam

pasal 19 Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 134 tahun 2021 yang menjelaskan tentang tata kelola data dan informasi serta penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan konvergensi percepatan pencegahan stunting.

viii) Review Kinerja Tahunan

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ramlan

Darmansyah, dapat diketahui bahwa Para implementor dari setiap tingkat berkumpul untuk melakukan review tahunan untuk meneliti bagaimana kinerja setiap implementor dalam implementasi kebijakan, menganalisis data-data terkait naik atau turunnya angka stunting, menjelaskan kendalakendala yang dialami selama satu tahun kerja, menganalisis hasil dari setiap program yang telah dijalankan, dan bagaimana perkembangan implementasi kebijakan.

b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Percepatan Pencegahan dan

Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

- Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Gizi dan Pangan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pingkan (2024:66) menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang memiliki balita stunting di wilayah kecamatan lima puluh memiliki latar belakang pendidikan rendah seperti SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Fakta ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran yang signifikan terhadap kejadian stunting. Orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami gizi serta kurang menerapkan pola pengasuhan yang tepat bagi anak-anak mereka.

(Ardian, et al., 2021).

- Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penurunan Dan Pencegahan Stunting

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ramlan

Darmansyah dan ibu Isra Maretfa, diketahui bahwa masih banyaknya masyarakat Kecamatan Lima Puluh yang enggan atau kurang berminat untuk datang ke posyandu. Hal ini menjadi faktor penghambat pencegahan stunting. Partisipasi publik sangatlah penting agar implementor dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat sebab jika publik tidak berpartisipasi, kebijakan tersebut tidak akan berjalan dan tidak meraih hasil yang maksimal.

- Faktor Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Pingkan (2024:66) menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang tinggal di wilayah lahan basah Kecamatan Lima Puluh cenderung memiliki pekerjaan tidak tetap, yang berdampak pada penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini menjadikan tingkat perekonomian di kawasan tersebut belum optimal. Pendapatan yang tidak stabil menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi kejadian stunting. Temuan ini sejalan dengan studi Agustin & Rahmawati (2021), yang mengemukakan adanya hubungan signifikan antara pendapatan orang tua dan kasus stunting. Ketika kondisi ekonomi keluarga rendah, maka pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan anak menjadi terbatas, sehingga pertumbuhan anak tidak dapat berkembang dengan optimal dan berisiko mengalami stunting

Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, penelitian ini menggunakan sudut pandang teori implementasi kebijakan dari George Edward

III

2. Komunikasi

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada efektivitas

komunikasi. Implementasi kebijakan akan berjalan optimal apabila para pengambil keputusan memahami secara jelas apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi berperan penting dalam menjaga konsistensi antara pembuat kebijakan dan pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, indikator komunikasi dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lima Puluh sudah terlaksana tetapi belum cukup baik, hal ini dilihat berdasarkan kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti edukasi-edukasi yang diberikan oleh posyandu dan puskesmas, sehingga dimensi konsistensi komunikasi belum cukup terpenuhi. Dalam hal ini para pelaksana kebijakan harus melakukan strategi pendekatan komunikasi yang baru, cocok, dan lebih baik untuk meningkatkan minat masyarakat agar aktif bersama-sama menjalankan kebijakan ini

3. Sumber Daya

Sumber daya dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk dukungan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dukungan tersebut meliputi tenaga manusia, sarana prasarana, serta otoritas yang dimiliki.

- a. Sarana dan Prasarana Berdasarkan hasil wawancarawawancara, peneliti dapat menemukan bahwa pada implementasi program percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Limapuluh memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Pertama-tama, ruang kerja yang berfungsi sebagai tempat pusat administrasi dan koordinasi sekaligus merupakan tempat para implementor kebijakan melakukan tugasnya. Selanjutnya, ruang rapat yang digunakan oleh para implementor kebijakan untuk berkoordinasi, berdiskusi, dan mengambil keputusan bersama terkait implementasi program percepatan pencegahan stunting

juga sudah tersedia. Terakhir ruang bermain anak di Puskesmas Kecamatan Limapuluh.

- b. Sumber Daya Manusia Dalam wawancara bersama Ibu Isra Maretfa, terkait Kader-kader posyandu di kecamatan Lima Puluh menekankan pentingnya memperhatikan insentif untuk para kader posyandu, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia (kader posyandu) perlu diberikan penghargaan atau insentif agar mereka termotivasi untuk bekerja lebih optimal. Insentif yang diberikan dapat berupa uang, piagam penghargaan, bantuan operasional, pembekalan, dan sebagainya yang dapat meningkatkan motivasi para kader posyandu. Insentif berbentuk tunai dinilai efektif dalam memacu kinerja para kader, karena memberikan dorongan moral dan semangat kerja yang lebih tinggi.

4. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, karakter, serta sifat bawaan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Faktor ini tercermin dari tingkat tanggung jawab dan komitmen implementor dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancarawawancara, ditemukan bahwa tindakan-tindakan para Implementor Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Limapuluh telah memiliki disposisi yang baik dan positif terhadap kebijakan yang ingin di implementasikan. Hal ini tercerminkan Komitmen Pihak Kecamatan dalam menjalankan tugas monitoring dan fasilitator. Kemudian Komitmen Pihak Puskesmas dalam menjalankan tugasnya yang telah sesuai dengan Kegiatan-kegiatan Intervensi Gizi yang ditetapkan.

Terakhir, komitmen Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas-tugasnya telah selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021. Komitmen para implementor memiliki andil yang signifikan dalam implementasi kebijakan sebab tanpa adanya komitmen dalam proses implementasi kebijakan akan menyebabkan kebijakan yang memiliki kesan tidak sepenuh hati dalam pelaksanaannya

5. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah entitas yang bertugas melaksanakan kebijakan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya struktur pemerintahan dan organisasi swasta. Struktur tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Elemen-elemen penting dalam struktur birokrasi antara lain pembagian tugas, prosedur, kewenangan, kejelasan tanggung jawab, dan interaksi antar lembaga atau aktor yang terkait

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa aspek struktur birokrasi dari para pelaksana kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Limapuluh terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari sinergi tugas-tugas dari para pihak implementor kebijakan. Pertama, Pihak Posyandu dan Puskesmas sama-sama memiliki tugas untuk melakukan pencatatan dan pengukuran terkait data stunting. Kedua, Puskesmas kemudian bertanggung jawab untuk melaporkan data-data tersebut setiap bulannya kepada Dinas Kesehatan. Ketiga, data-data tersebut akan dipantau dan dianalisis oleh Pihak Dinas Kesehatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang dijalankan dan akan dijalankan kedepannya. Keempat, pelaksanaan program-program tersebut kemudian difasilitasi dan dipantau oleh Pihak Kecamatan Limapuluh

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru

sudah terlaksana namun belum cukup sempurna karena masih ada beberapa indikator yang belum cukup terpenuhi. Pertama, pada komunikasi yang dilihat melalui 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam pengimplementasian aspek komunikasi cenderung kurang efektif dikarenakan masih kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti edukasi dan sosialisasi yang diberikan oleh posyandu dan puskesmas. Dari data yang peneliti dapatkan, diketahui bahwa masih ada beberapa individu yang tidak tertarik dan enggan untuk berpartisipasi kegiatan tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berkomunikasi tentu memberikan dampak terhadap implementasi kebijakan ini. Kedua, Sumber Daya, mencakup sumber daya manusia dan fasilitas. Dari data yang peneliti peroleh, meskipun sarana dan prasarana telah memadai namun peneliti menemukan bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, yang mana perlu untuk memperhatikan para kader posyandu khususnya pemberian insentif baik itu berupa piagam penghargaan ataupun bantuan operasional, pembekalan, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kualitas para kader posyandu. Ketiga, Disposisi, dalam pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan stunting ini, para pelaksana kebijakan telah menunjukkan sikap disposisi positif melalui tindakan selalu siap, aktif dan bertanggungjawab dalam menjalankan setiap program-program pencegahan stunting. Keempat, Struktur Birokrasi, para pelaksana kebijakan telah memahami serta melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sinergi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2021.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Lima Puluh adalah kurangnya pemahaman ibu hamil terkait gizi dan pangan, faktor ekonomi, serta kurangnya partisipasi dari

masyarakat untuk mendukung implementasi program percepatan pencegahan dan penurunan stunting ini **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Diharapkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Puskesmas, dan Camat Kecamatan LimaPuluh membuat strategi pendekatan komunikasi yang baru, cocok, dan lebih baik untuk meningkatkan minat masyarakat agar aktif bersama-sama mendukung pelaksanaan kebijakan ini, serta aktif melalui media online maupun media promosi cetak seperti banner dan spanduk.
2. Diharapkan pemerintah setempat memperhatikan kader-kader posyandu khususnya insentif seperti piagam penghargaan, bantuan operasional dan pembekalan yang dapat meningkatkan kualitas para kader posyandu.
3. Diharapkan Masyarakat aktif berkontribusi dan lebih peduli terhadap proses pelaksanaan program percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Limapuluh.

DAFTAR PUSTAKA Buku

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Bhattacharyya K, Winch P, Leban K, Tien M. *Community health worker incentives and disincentives: how they affect motivation, retention, and sustainability. Basic Support for Institutionalizing Child Survival Project (Basic II)*. Arlington: The United State Agency for International Development; 2001.
- Budi Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Edward III, George C. (1984), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England.
- Eko Putro Sandjojo. (2017). *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting: Jakarta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi*
- Fikawati, S. (2017). *Dkk. Gizi Anak Dan Remaja*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). *Widyakarya nasional pangan dan gizi XI 2018: Penguatan koordinasi pembangunan pangan dan gizi dalam penurunan stunting*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Miles, Huberman D, Saldaria. (2014). *Qualitative data analysis*. London: England.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarta
- Nasional, B. P. P. (2018). *Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota*. Jakarta: Bappenas.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Trihono, T., Atmarita, A., Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Nurlinawati, I., Utami, N. H., & Tejayanti, T. (2015). Pendek (stunting) di Indonesia, masalah dan solusinya. Lembaga Penerbit Badan Litbangkes.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Skripsi, Thesis, Disertasi :**
- Aisyah. (2023) Implementasi Program Pencegahan Stunting Rokan Hilir Studi Kasus Bagan Sinembah Timur. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Dafriadi. (2021). Implementasi Program Penanggulangan Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Skripsi. Fakultas ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah: Makassar.
- Fahzira, E. (2021). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar. Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Immanuel, J. A. (2022). Implementasi Program Penurunan Stunting Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Naditya, R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nelfia, G. (2023). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Pelealu, C. B. (2022). Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Dalam Mewujudkan Minahasa Utara Bebas Stunting 2022 (Doctoral dissertation, IPDN JATINANGOR).
- Purba, S. H. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Jurnal :**
- Agustin, L & Rahmawati, D (2021), „Hubungan Pendapatan Keluarga Pengetahuan Ibu Dengan Kejadian Stunting“, Indonesian Journal of Midwifery (IJM), vol. 4, no. 1, pp. 27–32.
- Agustino, H., & Purwo Widodo, E. R. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang . Sospol, 8(2), 241–252
- Ardian, D., & Utami, E. (2021). Pengaruh Karakteristik Demografi Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Provinsi Sulawesi Barat. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 397-406.
- Czapanskiy, Karen Syma., & Manjoo, Rashida. (2008). The Right of Public Participation in the Law-Making Process and the Role of Legislature in the Promotion of This Right. Duke Journal of Comparative & International Law, Vol.19,(No.1),pp.1-40
- Febrian, F., Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 3(1), 11-21

- Harris, Sarah Parker., Owen, Randall., & Gould Robert. (2012). Parit of Participation in Liberal Welfare States: Human Rights, Neoliberalism, Disability and Employment. *Disability and Society*, Vol.26, 1-12.
- Husni, R., Zuhriya, M., & Diani, R. I. (2024). Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Lestari, Indonesia Tentang Kenaikan Ukt Di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 328-341.
- Larasati, K. L., & Raharjo, B. B. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(3), 212-219.
- T. R. (2023). Stunting di Indonesia: akar masalah dan solusinya. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XV (14), 21-25.